PENGUATAN KEBIJAKAN BAHASA DAN PENGEMBANGAN LANGUAGE ENVIRONMENT MELALUI WORKSHOP PARTISIPATIF DI PONDOK PESANTREN AS-SYIFA SAGALAHERANG

Agus Supriatna[1]*, Apri Wardana Ritonga[2], Jailani Musni[3], Sudiman[4]

[1]Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam As-Syifa, Subang, Indonesia
[2]Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam As-Syifa, Subang, Indonesia
[3]Pendidikan Bahasa Arab, STAI Al Hidayah, Tasikmalaya, Indonesia
[4]Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam As-Syifa, Subang, Indonesia
**Penulis korespondensi: agussupriatna@stiq.assyifa.ac.id*

ABSTRAK

Pengembangan kemampuan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris di lingkungan pesantren memerlukan dukungan kebijakan kelembagaan, strategi pembelajaran komunikatif, serta lingkungan berbahasa yang terencana dan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas pimpinan, guru bahasa, koordinator bahasa, serta musyrif dan musyrifah dalam mengembangkan ekosistem bahasa di Pondok Pesantren As-Syifa Sagalaherang. Kegiatan dilaksanakan melalui workshop partisipatif selama tiga hari, yaitu pada 21 Agustus 2026, dengan melibatkan 29 peserta yang terdiri atas unsur pimpinan dan tenaga pendidik. Metode pelaksanaan meliputi pemetaan masalah, penyampaian materi, diskusi terarah, simulasi pembelajaran komunikatif, workshop penyusunan kebijakan bahasa, serta perumusan rencana tindak lanjut. Kegiatan ini menghasilkan sejumlah luaran berupa peta masalah kebijakan bahasa, rancangan kebijakan dan program pengembangan lingkungan bahasa, pembagian tugas pengelola bahasa, serta rekomendasi strategis bagi pimpinan pesantren. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi terhadap proses dan keterlibatan peserta, didukung dokumentasi kegiatan. Secara keseluruhan, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi kelembagaan, memperkuat tata kelola program kebahasaan, dan menciptakan budaya penggunaan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren.

Kata kunci: kebijakan bahasa; ekosistem bahasa; Bahasa Arab; Bahasa Inggris; pesantren

ABSTRACT

The development of Arabic and English language skills in Islamic boarding schools requires institutional policy support, communicative teaching strategies, and a well-planned and sustainable language environment. This community service program aimed to strengthen the capacity of school leaders, language teachers, language coordinators, and male and female dormitory supervisors in developing a language ecosystem at As-Syifa Islamic Boarding School, Sagalaherang. The program was conducted through a three-day participatory workshop on August 21 2026, involving 29 participants from the school leadership and teaching staff. The implementation methods included problem mapping, material delivery, focused discussions, communicative learning simulations, language policy development workshops, and the formulation of follow-up action plans. The program produced several outputs, including a language policy problem map, draft language policies and programs for developing the language environment, a division of responsibilities among language program administrators, and strategic recommendations for the boarding school leadership. The program was evaluated through observations of the implementation process and participant engagement, supported by activity documentation. Overall, this program is expected to serve as a strategic step toward strengthening institutional synergy, improving language program management, and fostering a consistent culture of Arabic and English use in the daily life of the boarding school.

Keywords: language policy; language ecosystem; Arabic; English; Islamic boarding school

1. PENDAHULUAN

Penguasaan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris merupakan salah satu kebutuhan penting dalam pengembangan kompetensi peserta didik di lingkungan pendidikan Islam. Bahasa Arab memiliki kedudukan strategis sebagai bahasa sumber utama ajaran Islam sekaligus sarana komunikasi akademik dan internasional. Sementara itu, Bahasa Inggris berperan sebagai bahasa komunikasi global yang membuka akses terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan interaksi lintas negara. Oleh karena itu, pengembangan kedua bahasa tersebut di pesantren tidak cukup dilakukan melalui pembelajaran formal di kelas, tetapi perlu didukung oleh lingkungan pendidikan yang memungkinkan peserta didik menggunakan bahasa secara konsisten dalam berbagai aktivitas.

Pesantren memiliki karakteristik lingkungan pendidikan yang memungkinkan pembentukan budaya berbahasa melalui integrasi kegiatan pembelajaran, kehidupan asrama, ibadah, dan interaksi sosial. Akan tetapi, keberadaan lingkungan pendidikan yang terintegrasi tidak secara otomatis menghasilkan lingkungan berbahasa yang efektif. Pengembangan budaya berbahasa membutuhkan kebijakan yang jelas, pembagian tanggung jawab, keteladanan pendidik, program pembiasaan, serta mekanisme pemantauan yang berjalan secara berkelanjutan.

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bahasa di pesantren adalah kemungkinan terjadinya kesenjangan antara kebijakan kelembagaan dan praktik penggunaan bahasa. Kebijakan bahasa dapat disusun dalam bentuk peraturan, tetapi pelaksanaannya memerlukan koordinasi antara pimpinan, guru bahasa, koordinator bahasa, serta musyrif dan musyrifah. Demikian pula, pembelajaran bahasa di kelas perlu memiliki hubungan dengan praktik komunikasi di luar kelas. Apabila kedua ranah tersebut berjalan sendiri-sendiri, pembelajaran bahasa berisiko menjadi aktivitas akademik yang tidak berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Dalam perspektif perencanaan bahasa, pengembangan bahasa di lembaga pendidikan berkaitan dengan penetapan tujuan, pengaturan penggunaan bahasa, pengembangan sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan secara terencana. Kaplan dan Baldauf (1997) menjelaskan bahwa perencanaan bahasa memerlukan hubungan antara kebijakan, pelaksana, dan konteks sosial tempat bahasa digunakan Perspektif tersebut tetap relevan dalam konteks pesantren, terutama ketika kebijakan bahasa harus diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan dan pembelajaran sehari-hari. Spolsky (2004) juga memandang kebijakan bahasa sebagai hubungan antara praktik bahasa, keyakinan atau ideologi bahasa, dan pengelolaan bahasa. Kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bahasa tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan aturan, melainkan sebagai sistem yang melibatkan praktik dan pengelolaan penggunaan bahasa.

Implementasi kebijakan bahasa di lingkungan pesantren tidak hanya bergantung pada keputusan pimpinan, tetapi juga pada kemampuan guru menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik pembelajaran. Guru memiliki peran sebagai agen kebijakan yang menghubungkan kebijakan kelembagaan dengan praktik penggunaan bahasa di kelas (Abdurrizal et al., 2022). Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan multilingual juga memengaruhi pengalaman komunikasi, adaptasi, dan identitas kebahasaan peserta didik (Sa’adah et al., 2025).

Pada sisi pembelajaran, pendekatan komunikatif menempatkan kemampuan menggunakan bahasa dalam konteks komunikasi sebagai salah satu orientasi utama pembelajaran. Littlewood (1981) menekankan pentingnya aktivitas yang memberi kesempatan kepada pembelajar untuk menggunakan bahasa dalam situasi komunikatif. Sementara itu Richards & Rodgers (2014) juga menjelaskan bahwa pendekatan dan metode pembelajaran bahasa perlu memperhatikan tujuan, peran guru dan peserta didik, aktivitas pembelajaran, serta konteks penerapannya. Dengan demikian, pengembangan lingkungan

bahasa di pesantren perlu menghubungkan pembelajaran formal dengan kesempatan penggunaan bahasa dalam interaksi nyata.

Penerapan lingkungan bahasa di pesantren masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain inkonsistensi penggunaan bahasa, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya tenaga pengajar yang kompeten (Samin et al., 2025). Selain itu, penataan ruang dan tanda-tanda kebahasaan di lingkungan pesantren dapat menjadi bagian dari upaya membangun kebiasaan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari (Maf'udah et al., 2025).

Kajian perencanaan bahasa dan pembelajaran komunikatif memberikan landasan penting bagi pengembangan bahasa di pesantren. Namun, kedua perspektif tersebut perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme kelembagaan yang sesuai dengan karakteristik pesantren. Kebijakan pimpinan perlu terhubung dengan program pembelajaran guru, sedangkan pembiasaan bahasa di asrama dan lingkungan pesantren memerlukan pendampingan serta koordinasi pengelola. Dengan demikian, persoalan yang perlu dijawab bukan hanya bagaimana mengajarkan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, tetapi juga bagaimana membangun sistem yang menghubungkan kebijakan, pembelajaran, pembiasaan, dan evaluasi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Pondok Pesantren As-Syifa Sagalaherang melalui workshop yang melibatkan unsur pimpinan, guru, dan tenaga kependidikan serta kepesantrenan. Pelibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan agar perumusan kebijakan dan program bahasa tidak hanya menjadi tanggung jawab guru bahasa, tetapi menjadi agenda kelembagaan yang dilaksanakan secara kolaboratif.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, kegiatan ini merumuskan Model Integrasi Kebijakan dan Ekosistem Bahasa Pesantren (MIKEB-P). Model ini mengintegrasikan empat komponen utama, yaitu kebijakan kelembagaan, pembelajaran komunikatif, pembiasaan bahasa dalam lingkungan pesantren, serta monitoring dan evaluasi. Kebaruan konseptual model terletak pada penekanan hubungan antarkomponen dan pembagian peran para pemangku kepentingan dalam satu kerangka pengelolaan bahasa.

Tujuan kegiatan ini adalah: (1) mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan pengembangan kebijakan Bahasa Arab dan Inggris di pesantren; (2) merumuskan rancangan integrasi kebijakan dan ekosistem bahasa berdasarkan hasil workshop; dan (3) menghasilkan rekomendasi pembagian peran serta tindak lanjut pengembangan budaya berbahasa di Pondok Pesantren As-Syifa Sagalaherang.

2. METODE

2.1 Desain Penelitian dan Kerangka Pengembangan

Kegiatan ini menggunakan pendekatan workshop partisipatif dengan analisis deskriptif terhadap proses dan produk kegiatan. Pendekatan tersebut dipilih karena kegiatan berorientasi pada identifikasi kebutuhan, perumusan rancangan kebijakan, dan penyusunan model konseptual pengembangan lingkungan bahasa berdasarkan keterlibatan para pemangku kepentingan.

Kegiatan ini tidak dikategorikan sebagai penelitian dan pengembangan yang telah menyelesaikan tahapan validasi ahli dan uji efektivitas. Tahapan yang benar-benar dilaksanakan meliputi pemetaan kebutuhan, perancangan gagasan kebijakan dan program, simulasi strategi pembelajaran serta pembiasaan bahasa, dan perumusan rekomendasi tindak lanjut. Produk yang dihasilkan menjadi dasar penyusunan model konseptual MIKEB-P.

Kerangka pelaksanaan kegiatan disusun dalam tiga tahap. Tahap pertama berorientasi pada identifikasi masalah dan kebutuhan kebijakan bahasa. Tahap kedua berfokus pada penguatan strategi

pembelajaran dan pengelolaan program bahasa. Tahap ketiga diarahkan pada integrasi hasil pembahasan, penyusunan rekomendasi, dan perumusan rencana tindak lanjut.

2.2 Latar, Partisipan, dan Teknik Pengambilan Sampel

Kegiatan dilaksanakan di Pondok Pesantren As-Syifa Sagalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada 21 Agustus 2026 dengan partisipan berjumlah 29 orang yang terdiri atas lima pimpinan atau wakil kepala madrasah dan 24 guru serta tenaga kependidikan dan kepesantrenan. Kelompok pimpinan meliputi unsur bidang hubungan masyarakat dan sarana prasarana, pembinaan putra, pembinaan putri, serta bina prestasi. Kelompok kedua meliputi guru Bahasa Arab, guru Bahasa Inggris, guru Pendidikan Agama Islam, dan unsur tenaga kependidikan serta kepesantrenan.

Partisipan dilibatkan secara purposif berdasarkan keterkaitan tugas dan tanggung jawab mereka dengan pengelolaan pendidikan, pembelajaran bahasa, dan pembinaan kehidupan peserta didik. Pelibatan kedua kelompok tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif kelembagaan dan perspektif pelaksanaan program secara bersamaan.



Gambar 1. Pembukaan Workshop Kebijakan Bahasa dan Pengembangan Language Environment oleh Mudir Ponpes

2.3 Komponen Model dan Prosedur Penelitian

Model konseptual yang dirumuskan diberi nama Model Integrasi Kebijakan dan Ekosistem Bahasa Pesantren (MIKEB-P). Model ini menempatkan pengembangan bahasa sebagai tanggung jawab kelembagaan yang menghubungkan kebijakan pimpinan, pembelajaran di kelas, pembiasaan di lingkungan pesantren, dan evaluasi program.

Komponen model meliputi:

1. Kebijakan kelembagaan. Komponen ini mencakup visi pengembangan bahasa, peraturan, standar penggunaan Bahasa Arab dan Inggris, dukungan sumber daya, serta koordinasi antarpengelola.
2. Pembelajaran komunikatif. Komponen ini mencakup pembelajaran kontekstual, latihan berbicara, percakapan, permainan peran, praktik berpasangan, dan aktivitas pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan bahasa.
3. Ekosistem dan pembiasaan bahasa. Komponen ini menghubungkan penggunaan bahasa di kelas, asrama, masjid, kantin, lapangan, dan kegiatan harian. Guru, koordinator bahasa, musyrif, dan musyrifah berperan sebagai pendamping sekaligus teladan penggunaan bahasa.
4. Monitoring dan evaluasi. Komponen ini mencakup pemantauan pelaksanaan program, pencatatan kendala, evaluasi keterlaksanaan, dan penyusunan tindak lanjut secara berkala.

Prosedur kegiatan dilaksanakan sebagai berikut.

Tahap pertama: Pemetaan masalah dan penguatan kebijakan bahasa

Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai kebijakan bahasa dan pengembangan lingkungan bahasa. Pada kelompok pimpinan, peserta melakukan diskusi dan pemetaan terhadap kebijakan yang telah berjalan, kesenjangan antara kebijakan dan praktik, hambatan pelaksanaan, serta kebutuhan perbaikan.

Pada kelompok guru dan tenaga pembinaan, peserta melakukan pemetaan lingkungan penggunaan bahasa yang mencakup ruang kelas, masjid, asrama, kantin, lapangan, dan kegiatan keseharian santri. Peserta kemudian merancang bentuk aktivasi lingkungan bahasa yang sesuai dengan aktivitas pesantren.

Tahap kedua: Strategi pembelajaran dan manajemen program bahasa

Pada tahap ini, peserta kelompok pimpinan memperoleh penguatan mengenai manajemen program bahasa, sinkronisasi kebijakan, pembagian tugas, serta sistem monitoring dan evaluasi.

Sementara itu, kelompok guru dan tenaga pembinaan mengikuti materi pembelajaran bahasa komunikatif dan kontekstual. Kegiatan dilanjutkan dengan praktik microteaching, simulasi percakapan, role play, serta penyusunan aktivitas bahasa yang dapat diterapkan di kelas dan asrama.

Tahap ketiga: Integrasi kebijakan dan penyusunan rencana tindak lanjut

Tahap ketiga diarahkan pada integrasi hasil workshop kedua kelompok. Peserta kelompok pimpinan menyusun rancangan kebijakan prioritas dan kerangka program pengembangan bahasa. Kelompok guru dan tenaga pembinaan menyusun Language Action Plan yang memuat kebiasaan berbahasa, aktivitas harian, strategi pendampingan, bentuk apresiasi, dan indikator keberhasilan.

Kedua kelompok selanjutnya menyampaikan hasil kerja untuk dirumuskan menjadi rekomendasi pengembangan bahasa bagi Pondok Pesantren As-Syifa Sagalaherang.

Tahap	Tujuan	Data dan Partisipan	Luaran atau Keputusan
Pemetaan kebutuhan	Mengidentifikasi persoalan kebijakan dan lingkungan bahasa	Pimpinan, guru, dan tenaga kepesantrenan	Peta masalah kebijakan bahasa
Perumusan kebijakan	Mengembangkan gagasan pengelolaan bahasa	Pimpinan dan pengelola program	Draf kebijakan bahasa
Pengembangan strategi	Mengidentifikasi strategi pembelajaran dan pembiasaan	Guru bahasa, koordinator, musyrif/musyrifah	Rancangan model lingkungan berbahasa
Integrasi program	Menghubungkan kebijakan dan pelaksanaan	Seluruh kelompok partisipan	Pembagian tugas pengelola bahasa
Perumusan tindak lanjut	Menetapkan rekomendasi	Pimpinan dan seluruh partisipan	Rekomendasi bagi pimpinan

Tahap	Tujuan	Data dan Partisipan	Luaran atau Keputusan
	pengembangan		pesantren

Tabel 1. Matriks tahapan pelaksanaan workshop

2.4 Instrumen dan Kualitas Bukti

Data kegiatan diperoleh melalui observasi proses workshop dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mencatat keterlibatan peserta, proses diskusi, pelaksanaan simulasi, dan hasil pembahasan kelompok. Dokumentasi digunakan untuk merekam pelaksanaan kegiatan dan mendukung deskripsi proses serta produk workshop.

Data yang tersedia bersifat deskriptif dan berorientasi pada proses serta luaran kegiatan. Kegiatan ini tidak menggunakan instrumen tes kemampuan bahasa, angket validasi ahli, skala kepraktisan, maupun instrumen pengukuran efektivitas sebelum dan sesudah kegiatan. Oleh karena itu, hasilnya tidak digunakan untuk menyimpulkan peningkatan kompetensi bahasa atau perubahan perilaku berbahasa peserta didik.

2.5 Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilaksanakan selama tiga hari kegiatan. Observasi dilakukan selama sesi pemetaan, diskusi, simulasi, presentasi, dan perumusan rekomendasi. Dokumentasi berupa foto kegiatan digunakan sebagai bukti pendukung pelaksanaan.

Analisis dilakukan secara deskriptif melalui pengelompokan hasil kegiatan ke dalam lima kategori luaran: peta masalah kebijakan bahasa, draf kebijakan bahasa, rancangan model lingkungan berbahasa, pembagian tugas pengelola bahasa, dan rekomendasi bagi pimpinan. Selanjutnya, kelima luaran tersebut disintesiskan ke dalam komponen MIKEB-P. Analisis ini merupakan sintesis deskriptif terhadap produk workshop, bukan analisis statistik atau pengujian efektivitas model.

2.6 Pertimbangan Etis

Pelaksanaan kegiatan melibatkan unsur pimpinan, guru, dan tenaga kependidikan serta kepesantrenan sebagai partisipan workshop. Dokumentasi kegiatan digunakan untuk kepentingan pelaporan dan publikasi ilmiah dengan tetap memperhatikan kepatutan penggunaan foto serta identitas partisipan. Informasi mengenai nomor surat izin kelembagaan, persetujuan penggunaan dokumentasi, atau persetujuan etik formal perlu dilengkapi berdasarkan dokumen yang dimiliki penyelenggara sebelum naskah diserahkan kepada jurnal.

3. HASIL

3.1 Analisis Kebutuhan dan Persyaratan Desain

Workshop melibatkan dua kelompok partisipan dengan tanggung jawab yang saling melengkapi. Kelompok pimpinan berperan dalam pembahasan kebijakan, koordinasi, dan keberlanjutan program. Kelompok guru dan tenaga kepesantrenan berperan dalam pembahasan pembelajaran, praktik penggunaan bahasa, serta pembiasaan di lingkungan pesantren.

Pembagian kelompok tersebut menjadi dasar penyusunan rancangan integrasi kebijakan dan ekosistem bahasa. Pengembangan bahasa memerlukan hubungan antara keputusan kelembagaan dan pelaksanaan program di lapangan. Kebijakan yang disusun oleh pimpinan perlu diterjemahkan menjadi program pembelajaran dan pembiasaan yang dapat dilaksanakan oleh guru, koordinator bahasa, serta musyrif dan musyrifah. Adapun hasil kegiatan menghasilkan lima luaran utama:

Pertama, peta masalah kebijakan bahasa. Luaran ini merupakan hasil pemetaan dan diskusi mengenai kebutuhan pengelolaan bahasa, koordinasi, pelaksanaan aturan, kesinambungan program, serta hubungan antara kegiatan pembelajaran dan pembiasaan di lingkungan pesantren. Peta tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan.

Kedua, draf kebijakan bahasa. Workshop menghasilkan draf kebijakan sebagai bahan rekomendasi pengelolaan Bahasa Arab dan Inggris. Draf ini diarahkan untuk menghubungkan tujuan pengembangan bahasa, pengaturan penggunaan bahasa, tanggung jawab pengelola, pembiasaan, dan evaluasi. Draf tersebut merupakan produk workshop dan tidak dinyatakan sebagai peraturan resmi yang telah disahkan pimpinan pesantren.

Ketiga, rancangan model lingkungan berbahasa. Rancangan ini menempatkan penggunaan bahasa sebagai aktivitas lintas ruang dan kegiatan. Lingkungan berbahasa tidak hanya dibatasi pada pembelajaran di kelas, tetapi juga mencakup asrama, masjid, kantin, lapangan, dan interaksi sehari-hari.

Keempat, pembagian tugas pengelola bahasa. Workshop menghasilkan gagasan pembagian peran antara pimpinan, guru bahasa, koordinator bahasa, dan musyrif/musyrifah. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk menghindari ketergantungan program pada satu kelompok pelaksana dan memperkuat koordinasi kelembagaan.

Kelima, rekomendasi bagi pimpinan pesantren. Rekomendasi diarahkan pada penguatan kebijakan, koordinasi, dukungan program, kesinambungan pembiasaan bahasa, serta pemantauan pelaksanaan. Rekomendasi ini menjadi bahan pertimbangan untuk tindak lanjut kelembagaan.

3.2 Model yang Dikembangkan dan Komponennya

Berdasarkan sintesis lima luaran workshop, dirumuskan Model Integrasi Kebijakan dan Ekosistem Bahasa Pesantren (MIKEB-P). Model ini merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara kebijakan kelembagaan, pembelajaran komunikatif, pembiasaan bahasa, dan monitoring serta evaluasi.



Gambar 2. Model Integrasi Kebijakan dan Ekosistem Bahasa Pesantren (MIKEB-P)

Model ini memperlihatkan bahwa kebijakan kelembagaan menjadi dasar bagi pelaksanaan pembelajaran dan pembiasaan bahasa. Kedua komponen pelaksanaan tersebut saling melengkapi. Pembelajaran komunikatif menyediakan pengalaman dan kemampuan awal untuk menggunakan bahasa, sedangkan lingkungan pesantren menyediakan ruang praktik yang lebih luas. Monitoring dan evaluasi berfungsi sebagai mekanisme umpan balik bagi pimpinan dan pengelola untuk memperbaiki program secara berkelanjutan.

Komponen	Fokus pelaksanaan	Pelaksana utama	Luaran yang diharapkan
Kebijakan kelembagaan	Tujuan, regulasi, koordinasi, dan dukungan	Pimpinan pesantren	Kebijakan dan dukungan program
Pembelajaran komunikatif	Praktik bahasa dan aktivitas kontekstual	Guru Bahasa Arab dan Inggris	Pembelajaran yang memberi ruang komunikasi
Pembiasaan bahasa	Penggunaan bahasa dalam aktivitas harian	Koordinator bahasa, musyrif/musyrifah	Lingkungan praktik bahasa
Monitoring dan evaluasi	Pemantauan dan perbaikan program	Pimpinan dan pengelola bahasa	Rekomendasi tindak lanjut

Tabel 2. Komponen dan peran pelaksana MIKEB-P

Secara operasional, penerapan model dimulai dari penetapan kebijakan dan pembagian tanggung jawab. Guru kemudian menerapkan strategi pembelajaran komunikatif, sementara koordinator bahasa dan musyrif/musyrifah mengembangkan kesempatan praktik dalam kegiatan harian. Pimpinan bersama pengelola melakukan pemantauan dan menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki kebijakan serta program.

3.3 Validasi, Kepraktisan, dan Efektivitas

Hasil workshop menunjukkan bahwa proses partisipatif menghasilkan lima luaran yang menjadi dasar perumusan model. Luaran tersebut mencakup aspek pemetaan kebutuhan, perumusan kebijakan, rancangan lingkungan berbahasa, pembagian tanggung jawab, dan rekomendasi kelembagaan.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Bukti yang tersedia mendukung pernyataan bahwa workshop telah dilaksanakan dan menghasilkan produk yang disebutkan. Namun,belum tersedia data penilaian ahli, pengukuran kepraktisan menggunakan instrumen terstandar, maupun pengukuran efektivitas melalui data awal dan pascakegiatan.

Aspek	Bukti yang tersedia	Status interpretasi
Keterlaksanaan workshop	Observasi dan dokumentasi kegiatan	Terlaksana sesuai rencana
Pemetaan kebutuhan	Produk pemetaan masalah kebijakan bahasa	Terdokumentasi sebagai luaran workshop
Rancangan kebijakan	Draf kebijakan bahasa	Produk awal, belum dinyatakan sebagai kebijakan resmi
Rancangan model	Sintesis lima luaran workshop	Model konseptual hasil kegiatan
Validitas model	Belum ada penilaian ahli	Belum dapat disimpulkan
Kepraktisan model	Belum ada pengukuran terstruktur	Belum dapat disimpulkan
Efektivitas model	Belum ada data awal dan pascaintervensi	Belum dapat disimpulkan

Tabel 3. Status bukti hasil kegiatan dan pengembangan model

Dengan demikian, hasil kegiatan lebih tepat dipahami sebagai dasar perumusan model konseptual dan rekomendasi implementasi. Penilaian mengenai validitas, kepraktisan, dan efektivitas MIKEB-P memerlukan penelitian lanjutan dengan melibatkan ahli kebijakan bahasa, ahli pembelajaran bahasa, serta pengguna model di lingkungan pesantren.



Gambar 3. Workshop bersama Guru Bahasa, Koordinator Bahasa, dan Musyrif



Gambar 4. Sesi Workshop Bersama para Pimpinan Ponpes As-Syifa Sagalaherang

4. PEMBAHASAN

Hasil utama kegiatan ini adalah tersusunnya kerangka integrasi antara kebijakan kelembagaan dan lingkungan berbahasa melalui MIKEB-P. Model tersebut berangkat dari pemahaman bahwa pengembangan Bahasa Arab dan Inggris di pesantren memerlukan keterlibatan berbagai unsur. Pimpinan bertanggung jawab terhadap arah kebijakan dan dukungan kelembagaan, guru berperan dalam pembelajaran, sedangkan koordinator bahasa dan musyrif/musyrifah mendukung pembiasaan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Spolsky (2004) bahwa kebijakan bahasa berkaitan dengan praktik, keyakinan, dan pengelolaan bahasa. Dalam konteks pesantren, kebijakan tidak cukup diwujudkan melalui aturan tertulis. Aturan perlu terhubung dengan praktik penggunaan bahasa dan dukungan para pelaksana. Oleh sebab itu, MIKEB-P menempatkan kebijakan kelembagaan sebagai komponen yang mengarahkan pembelajaran dan pembiasaan bahasa.

Perspektif perencanaan bahasa Kaplan dan Baldauf (1997) juga memberikan landasan bagi hubungan antara perencanaan, pelaksana, dan konteks sosial. Pesantren memiliki lingkungan sosial yang khas karena peserta didik menjalani aktivitas pendidikan dan kehidupan keseharian dalam satu ekosistem. Kondisi tersebut membuka peluang untuk menghubungkan pembelajaran formal dengan praktik bahasa di luar kelas. Namun, peluang tersebut membutuhkan perencanaan program, pembagian tanggung jawab, dan koordinasi yang konsisten.

Pada aspek pembelajaran, model ini mengintegrasikan pendekatan komunikatif ke dalam kegiatan pendidikan bahasa. Littlewood (1981) menekankan pentingnya kesempatan menggunakan bahasa dalam situasi komunikasi. Dalam konteks MIKEB-P, pembelajaran komunikatif tidak berdiri sendiri, tetapi dihubungkan dengan lingkungan praktik di asrama dan berbagai ruang aktivitas pesantren. Dengan demikian, kegiatan belajar di kelas diharapkan memiliki kesinambungan dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari.

Lingkungan bahasa yang efektif perlu dibangun melalui integrasi antara pembelajaran formal, pembiasaan komunikasi sehari-hari, pengawasan, dan keteladanan para pendidik. Penelitian Fitri et al. (2026) menunjukkan bahwa lingkungan bahasa Arab dapat dikembangkan sebagai sistem yang mengintegrasikan disiplin kebahasaan, interaksi teman sebaya, pemodelan bahasa, dan kegiatan rutin. Sementara itu, Hadziq et al. (2026) menekankan pentingnya input bahasa yang dapat dipahami, suasana belajar yang mendukung, dan perluasan praktik komunikasi ke lingkungan informal pesantren.

Richards dan Rodgers (2014) menjelaskan bahwa penerapan metode pembelajaran perlu memperhatikan tujuan, aktivitas, peran guru, peran peserta didik, dan konteks pembelajaran. Prinsip tersebut relevan dengan rancangan MIKEB-P karena guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memfasilitasi praktik komunikasi. Sementara itu, koordinator bahasa dan musyrif/musyrifah mendukung penggunaan bahasa di luar kelas melalui pendampingan dan keteladanan.

Pembentukan budaya berbahasa membutuhkan keterlibatan komunitas pesantren secara konsisten, bukan hanya pelaksanaan program pembelajaran di kelas. Pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi salah satu strategi untuk memperluas penggunaan bahasa Arab dalam interaksi sehari-hari (Makinuddin, 2025). Pada tingkat kelembagaan, keberhasilan kebijakan bahasa juga memerlukan keselarasan antara ideologi institusi, konsistensi implementasi, dan penyediaan paparan bahasa yang autentik (Bestari et al., 2026).

4.1 Kontribusi Penelitian

Kontribusi teoretis. Kegiatan ini mengintegrasikan perspektif perencanaan bahasa dan pembelajaran komunikatif dalam konteks pengelolaan lingkungan pendidikan pesantren. Integrasi tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan bahasa memerlukan hubungan antara kebijakan, pembelajaran, praktik sosial, dan evaluasi kelembagaan.

Kontribusi model. MIKEB-P menawarkan kerangka konseptual dengan empat komponen yang saling terhubung: kebijakan kelembagaan, pembelajaran komunikatif, pembiasaan bahasa, serta monitoring dan evaluasi. Model ini juga menegaskan pembagian peran antara pimpinan, guru, koordinator bahasa, dan musyrif/musyrifah. Kontribusinya terletak pada penyatuan komponen yang selama ini dapat dikelola secara terpisah ke dalam satu kerangka pengembangan bahasa.

Kontribusi praktis. Hasil workshop menyediakan lima luaran yang dapat digunakan sebagai bahan awal pengembangan program bahasa di Pondok Pesantren As-Syifa Sagalaherang. Peta masalah dan draf kebijakan dapat menjadi bahan pembahasan pimpinan, sedangkan rancangan lingkungan bahasa dan pembagian tugas dapat menjadi acuan koordinasi pelaksana. Penggunaan model di lembaga lain perlu mempertimbangkan karakteristik, sumber daya, dan kebijakan masing-masing pesantren.

4.2 Keterbatasan dan Penelitian Selanjutnya

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pelaksanaan hanya melibatkan satu pesantren dengan 29 partisipan sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke seluruh lembaga pesantren. Kedua, evaluasi menggunakan observasi dan dokumentasi, tanpa tes kemampuan bahasa, angket respons terstandar, atau pengukuran perilaku berbahasa peserta didik. Ketiga, model yang dirumuskan belum melalui validasi ahli, uji kepraktisan, dan pengujian efektivitas. Keempat, belum tersedia data longitudinal untuk mengetahui keberlanjutan implementasi rekomendasi dan perubahan budaya berbahasa.

Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan MIKEB-P melalui tahapan yang lebih sistematis. Tahap awal dapat berupa validasi isi dan konstruk oleh ahli perencanaan bahasa, pembelajaran Bahasa Arab dan Inggris, serta manajemen pendidikan pesantren. Selanjutnya, model dapat diuji secara terbatas untuk menilai kejelasan prosedur, kesesuaian pembagian peran, dan kemudahan penerapan. Pengujian lapangan dalam periode yang lebih panjang diperlukan untuk mengukur keterlaksanaan program dan perubahan penggunaan bahasa. Jika memungkinkan, penelitian berikutnya dapat menggunakan desain metode campuran dengan data observasi, wawancara, angket, serta pengukuran kompetensi bahasa yang sesuai.

5. SIMPULAN

Workshop partisipatif di Pondok Pesantren As-Syifa Sagalaherang menghasilkan lima luaran utama, yaitu peta masalah kebijakan bahasa, draf kebijakan bahasa, rancangan model lingkungan berbahasa, pembagian tugas pengelola bahasa, dan rekomendasi bagi pimpinan pesantren. Berdasarkan hasil tersebut, dirumuskan Model Integrasi Kebijakan dan Ekosistem Bahasa Pesantren (MIKEB-P) yang menghubungkan kebijakan kelembagaan, pembelajaran komunikatif, pembiasaan bahasa, serta monitoring dan evaluasi. Model ini menempatkan pengembangan Bahasa Arab dan Inggris sebagai tanggung jawab bersama seluruh unsur pesantren.

MIKEB-P merupakan model konseptual yang disusun berdasarkan hasil workshop dan belum dapat dinyatakan valid, praktis, atau efektif karena belum melalui validasi ahli dan pengujian lapangan. Kontribusi utama kegiatan ini adalah menyediakan kerangka awal dan produk perencanaan yang dapat digunakan sebagai dasar tindak lanjut pengembangan budaya berbahasa di pesantren. Penelitian berikutnya perlu melakukan validasi ahli, uji kepraktisan, dan pengujian implementasi secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren As-Syifa Sagalaherang, khususnya para pimpinan, guru, koordinator bahasa, serta musyrif dan musyrifah yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan workshop. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan dan penyusunan luaran pengabdian kepada masyarakat ini.

PENDANAAN

Penelitian ini didanai melalui pagu anggaran hibah internal Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam As-Syifa.

KONTRIBUSI PENULIS

Konseptualisasi: AS dan AWR; metodologi: AS dan AWR; investigasi: AS, AWR, JM, dan S; analisis data: AS dan AWR; penulisan draf awal: AS; penelaahan dan penyuntingan naskah: AS, AWR, JM, dan S. Seluruh penulis telah menyetujui naskah akhir.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan artikel ini.

KETERSEDIAAN DATA

Data deskriptif dan dokumentasi kegiatan yang mendukung artikel ini dapat diminta kepada penulis korespondensi secara wajar dengan tetap memperhatikan persetujuan penggunaan dokumentasi dan privasi partisipan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrizal, A., Asfiyani, D., & Wulansari, A. (2022). Teacher Agency in Multilingual Education Policy in an Islamic Boarding School in Indonesia. In *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan* (Vol. 14, Issue 3). https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i3.1206

Bestari, A. C. Y., Paramboor, J., Faiza, D., & Mayekti, M. H. (2026). Language Policy in Indonesian Islamic Boarding Schools (Pondok Pesantren): Implementation, Challenges and Impacts. *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, *10*(1), 62–81. https://doi.org/10.33507/cakrawala.v10i1.3780

Fitri, L., Mukhlishin, M., & Izomi, M. S. (2026). The Implementation of the Arabic Language Environment (Bi'ah "Arabiyah) as a Strategic Model for Developing Students" Communicative Competence at Hidayatullah Islamic Boarding School Lombok. *Journal of Educational Sciences*, *10*(1), 725–745. https://doi.org/10.31258/jes.10.1.p.725-745

Hadziq, M. F., Muzadi, N. H., Algatnaini, R. A. S., & Rinaldo, A. R. (2026). Comprehensible Input, Affective Filter, and Communicative Environment: A Case Study of Krashen's Five Hypotheses in an Indonesian Pesantren. *Alsuna: Journal of Arabic and English Language*, *9*(1), 71–90. https://doi.org/10.31538/alsuna.v9i1.9802

Kaplan, R. B., & Baldauf, R. B. (1997). *Language Planning: From Practice to Theory*. Multilingual Matters.

Littlewood, W. (1981). *Communicative Language Teaching: An Introduction*. Cambridge University Press.

Maf'udah, S., Bahruddin, U., & Barry, N. H. A. (2025). Arabic Language Practice in Islamic Boarding Schools: A Linguistic Landscape Study. *Shaut Al Arabiyyah*, *13*(1), 203–219. https://doi.org/10.24252/saa.v13i1.55860

Makinuddin, M. (2025). Pembangunan Lingkungan Bahasa Arab Aktif Berbasis Komunitas di Pesantren Modern Fathul Majid Kasiman Bojonegoro. *Ukazh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(3). https://doi.org/10.37274/ukazh.v6i3.5

Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Sa'adah, A., Rohmah, Z., Junining, E., & Abdullah, H. (2025). Exploring the Role of Language Policy in Facilitating Multilingual Communication among Pesantren Students. *JEES (Journal of English Educators Society)*, *10*(2), 219–224. https://doi.org/10.21070/jees.v10i2.1971

Samin, S. M., Akzam, I., Pebrian, R., & Fikriansyah, M. H. (2025). Tantangan dan Strategi Penerapan Lingkungan Bahasa Arab di Pesantren. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, *22*(1), 42–55. https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(1).21006

Spolsky, B. (2004). *Language Policy*. Cambridge University Press.